
DIMENSI EKONOMI DALAM KEADILAN POLIGAMI: TELAAH TAFSIR PERKAWINAN

DAINORI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriiim@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dimensi ekonomi sebagai salah satu aspek krusial dalam mewujudkan keadilan dalam praktik poligami, dengan pendekatan telaah tafsir ayat-ayat perkawinan dalam Al-Qur'an. Keadilan yang menjadi syarat utama poligami dalam Islam tidak hanya bersifat emosional dan spiritual, tetapi juga menyangkut keadilan material yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Studi ini menelaah bagaimana para mufasir klasik dan kontemporer memahami keterkaitan antara kemampuan ekonomi dan praktik poligami, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak dalam keluarga poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi ekonomi memiliki posisi sentral dalam penilaian keadilan, dan menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan seorang laki-laki untuk berpoligami. Dengan demikian, pendekatan tafsir yang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi menjadi relevan dalam memahami dan menerapkan hukum poligami secara adil dan berkeadaban.

Kata kunci: Poligami, Keadilan, Ekonomi Islam, Tafsir Al-Qur'an, Perkawinan.

ABSTRACT

This study examines the economic dimension as a crucial aspect in realizing justice in the practice of polygamy, using a tafsir (Qur'anic exegesis) approach to analyze verses related to marriage in the Qur'an. Justice, which is a fundamental requirement for polygamy in Islam, is not only emotional and spiritual but also includes material justice closely linked to economic aspects. This research explores how classical and contemporary exegetes interpret the relationship between economic capability and the practice of polygamy, as well as its implications for the protection of the rights of wives and children in polygamous families. The findings indicate that the economic dimension holds a central position in the assessment of justice and serves as a key indicator in determining a man's eligibility for polygamy. Therefore, a tafsir approach that takes into account the socio-economic context is essential for understanding and applying polygamy laws in a just and civilized manner.

Keywords: Polygamy, Justice, Islamic Economics, Qur'anic Exegesis, Marriage.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan relasi seksual pria dan wanita, yang tercatat sepanjang sejarah peradaban Islam adalah masalah poligami (*ta'addud al-zanajat*). Dahulu diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Ibrani, Arab, Jahiliyah, dan Cisilia. Namun hingga saat ini, meski poligami diterima oleh umat Islam secara luas, ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perdebatan hangat dikalangan masyarakat.

Demikian halnya di Indonesia, poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak dengan ketidak-adilan gender. Bahkan penulis Barat, sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat deskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.¹

Awal tarik ulur permasalahan poligami di Indonesia, telah mengemuka ketika dipicu oleh ramainya pemberitaan mengenai suksesnya seorang Puspo Wardoyo dalam berpoligami. Si jago poligami, demikian julukan Puspo Wardoyo yang merupakan keturunan pedagang ayam bakar dari Solo. Kesuksesan Puspo Wardoyo ini bukan karena sukses dalam bisnis ayam bakar orang tuanya, melainkan sukses karena telah mempoligami empat orang istri.² Keadaan ini, semakin laku dalam perbincangan diberbagai media, ketika persoalan poligami, dihebohkan oleh praktik poligami Aa Gym. Fenomena ini pada akhirnya menggiring sebagian masyarakat, dimana pemahaman masyarakat kala itu terkonstruksi dengan sendirinya, bahwa poligami seolah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama. Atas dasar itu pula, bagi pelaku poligami yang berhasil patut dibanggakan karena telah berhasil membuktikan “*perintah*” agama tersebut. Kebanggaan itu sangat terasa dengan hadirnya Poligami Award (penghargaan bagi pelaku poligami), yang setiap tahun dihadiahkan kepada mereka yang dianggap berhasil dalam membina rumah tangga poligami.³

Dalam melakukan poligami, jika seseorang merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan baik dari sisi psikologi ataupun materi, maka seorang muslim tersebut bisa saja dianjurkan untuk berpoligami. Akan tetapi, dengan tujuan menikah untuk menjaga kesucian serta memberikan perlindungan kepada mereka dan akan tetap berlaku adil.⁴

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tapi mencakup keadilan

¹ Ahmad Dakhoir, “*Poligami dan Power Ekonomi Studi Poligami di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia*”, *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 1, No. 1, Juli (2016), 1-2.

² *Ibid.*, 2.

³ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, Bandung: Pustaka IIMaN, 2007, 9

⁴ Abu Umar Basyir, *Poligami Anugerah Yang Terzhalimi*, Solo: Rumah Dzikir, 2007, 39

kuanitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).⁵

Pendapat ini didukung oleh al-Dhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal immateri (perasaan).⁶

Berbeda dengan beberapa pendapat diatas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah immateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw yakni ketika beliau merasa berdosa tidak mampu berbuat adil kepada para istri beliau, yang artinya “Ya Allah. Inilah kemampuanku, dan janganlah engkau bebankan aku kepada sesuatu yang tidak aku mampu...”.⁷

Isu keadilan adalah topik penting dalam berbagai bentuk perkawinan, termasuk poligami. Namun, poligami seringkali dikritik karena dianggap tidak adil, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Melalui penelitian ini, akan dibahas bagaimana tafsir perkawinan dapat membantu memahami dan mendefinisikan kembali konsep keadilan dalam poligami, terutama dalam hal pembagian hak ekonomi yang adil bagi masing-masing pihak. Secara keseluruhan, penelitian ini sangat penting untuk memberi kontribusi pada pemahaman yang lebih holistik mengenai praktik poligami, tidak hanya dari sudut pandang tradisional atau normatif, tetapi juga dari sisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pembahasan berisikan beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti angkat diantaranya ada teori poligami, keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

1. Perkawinan Poligami

a. Pengertian Poligami

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, 38

⁶ *Ibid.*, 38.

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, 359.

Kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyakempat orang.⁸

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁹

Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁰

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gune berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki.¹¹

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1974 kepada

⁸ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh MunakahatI, Jakarta: Kencana, 2003, 129.

⁹ Tihami, Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 351.

¹⁰ Eka Kurnia, Poligami Siapa Takut, Jakarta: Qultum Media, 2006, 2.

¹¹ Tihami, Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap, ..., 352.

Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.¹²

b. Syarat-syarat Poligami

Syarat-syarat bagi orang yang diperbolehkan melakukan poligami adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu berbuat adil di antara istri-istrinya, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خَفِنْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنَّهُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَاثَةٍ وَرُبْعَةٍ فَإِنْ خَفِنْتُمْ أَلَا تَعْلُمُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ إِيمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعْلُمُوا.

Artinya: “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya*”. (QS. An-Nisa 4:3).¹³

- 2) Mampu menjaga diri dari pesona fitnah mereka dan menyanyikan hak-hak Allah demi mengurusinya mereka. Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ عُذْرًا لَكُمْ فَاحذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوُرٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Taghabun 64:14).¹⁴

- 3) Mampu menjaga kehormatan dan citra diri mereka, sehingga tidak tercemar dan terjerumus dalam kerusakan, sebab Allah tidak menyukai kerusakan.
- 4) Mampu menafkahi mereka. Allah SWT berfirman:

¹² Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, 184

¹³ Al-Qur'an, 4:3.

¹⁴ Al-Qur'an, 64:14.

وَلَيُسْتَعِفَ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُؤْهِمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ تُكْرِهُوْنَ فَتَنَتَّبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرْدَنَ

تَحَصُّنًا لِتَبَتَّعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya: “*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan dunia. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu*”. (QS. Al-Nur 24:33).¹⁵

c. Hukum Poligami Dalam Islam

Hukum poligami dalam Islam bermula dari mubah. Artinya, diperbolehkan dengan beberapa syarat. Namaun, seperti halnya menikah yang dimulai dengan hukum sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan, poligami juga bisa berubah-ubah hukumnya sesuai kondisi seorang suami. Bisa dianjurkan, wajib, bisa juga makruh, bahkan haram. Artinya, bukan substansi poligami itu sendiri yang berubah menjadi wajib atau haram. Tapi, dilihat dari kondisi dan kapasitas pelakunya dan juga cara yang ditempuhnya untuk melakukan poligami.¹⁶

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dalam Islam tentu erat kaitannya dengan ayat-ayat *al-Qur'an* seperti dalam surat *al-Nisa'* dan beberapa *hadith* Nabi Muhammad Saw tentang poligami. Ayat-ayat dan beberapa *hadith* sebagai berikut:

1) An-Nisa' Ayat 3

وَإِنْ خَفِتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الِّسَّاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَّتَ وَرُبْعَ قَلْنَ خَفِتُمُ الَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ آدَمَيْ لَا تَعْوِزُكُمْ .

¹⁵ Al-Qur'an, 24:33.

¹⁶ Abu Umar Basyir, *Poligami Anugerah Yang Terindah*, Solo: Rumah Dzikir, 2007, 33.

Artinya: “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. (QS. An-Nisa’ 4:3).¹⁷

Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha yang dikutip oleh Boedi Abdullah dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatiannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹⁸

Maka dapat disimpulkan, bahwa maksud ayat 3 surah al-Nisa’ adalah melarang poligami secara lembut, atau memperbolehkan poligami dengan syarat yang amat ketat, karena untuk memenuhi syarat adil secara kualitatif sungguh sulit, bahkan tidak mungkin dapat dipenuhi. Akan tetapi, adil tidaknya seorang suami kepada istri-sitrinya hanya dapat dibuktikan setelah poligami berlangsung, maka dari itu hukum poligami menempatkan syarat adil adalah sebuah perilaku yang dibangun berdasarkan komitmen jiwa dan moral tinggi.

2) An-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْلِمُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَنَزَّهُوا كَالْمَعْلَفَةِ وَلَنْ
 تُصْلِحُوا وَتَنْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹⁷ Al-Qur'an, 4:3.

¹⁸ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, 30.

Artinya: “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelibara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. An-Nisa’ 4:129).¹⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil.²⁰ Adil yang dimaksud adalah supaya suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya, dan membiarkan yang lain terlantar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “*Poligami*” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.²¹ Selain harus menempuh sebagaimana beberapa persyaratan tersebut, yang tidak kalah pentingnya bagi seorang suami yang ingin poligami adalah adanya alasan yang realistik. Alasan inilah yang nantinya akan menjadi dasar layak tidaknya seorang suami untuk berpoligami.

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertengangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi

¹⁹ Al-Qur'an, 4:129.

²⁰ *Ibid.*, 35.

²¹ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Kencana, 2006, 9.

dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.²²

Jumhur Ulama secara mutlak membolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami, tetapi dengan syarat apabila dia dapat berlaku adil terhadap para istrinya, baik itu dari materi berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan *qasam* (pembagian giliran pulang) dan immateri yang berupa *mawaddah wa rahmah*, cinta kasih dan sayang.

Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.²³

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.²⁴

Poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar.

²² *Ibid.*, 10.

²³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Rafika, 2010, 37.

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Cendana, 2006, 269.

2. Keadilan Ekonomi

a. Pengertian Keadilan

Keadilan bertugas untuk menerangkan sifat-sifat dasar dan asal mula dari keadilan. Konsep keadilan sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab suatu perbuatan akan dikatakan adil kalau mengetahui tentang keadilan itu sendiri. Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut para filosof dan para ahli hukum:

1) Plato

Menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundangan yang dilihat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani *"Dikaiosune"* yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.²⁵

2) Aristoteles

Adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat jutitia bereat mundus. Selanjutnya ia membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu: pertama, keadilan distributif dan kedua, keadilan kolektif.²⁶

Etika dan keadilan merupakan perilaku manusia yang paling luhur, merupakan unsur penting dari martabat dan juga harkat manusia. Hukum, kaidah, peraturan-peraturan, kesadaran, nilai-nilai etis dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia itu adalah sebagai titik dasar, landasan yang bermuara pada kekuatan keadilan. Sebab, hukum itu sendiri dibuat untuk manusia agar berlaku adil. Jadi, etika dan keadilan sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya.²⁷

Begitu juga dengan sikap adil, harus ditanamkan dalam diri seseorang karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Berbuat adil didunia ini dapat membuat seseorang hidup tenang, tentram, disayangi orang-orang dekatnya. Keadilan yang sebenarnya pasti datang, jika setiap

²⁵ Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 92.

²⁶ James Garvey, 20 Karya Filsafat Terbesar, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 5.

²⁷ M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 536.

penghuni bumi ini melakukannya dan dimulai dari sendiri (*ibda' binafsi*).²⁸

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّادِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْلَمُونَ إِعْلَمُ هُوَ
أَفَرَبُ لِلنَّفْوِيْتِ وَانْقُوا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Maidah 5:8).²⁹

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan-persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu masalah. Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan, sesuai hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.³⁰

Keadilan ialah pengakuan dan perlakuan yang sama antara hak dan kewajiban. Jika seseorang mengakui hak hidup orang lain, maka orang tersebut wajib mempertahankan hak hidupnya dan mengakui keberadaannya secara layak, sebab orang lain pun mempunyai hak hidup yang sama juga. Keadilan ialah perlakuan sama yang didapat seseorang dari orang lain dengan hak dan derajat yang sama pula. Sama dalam arti proporsional yaitu disesuaikan dengan pekerjaan dan kebutuhan yang ia peroleh.³¹

Kata adil adalah bentuk mashdar dari kata kerja ‘*adala*, *ya’dilu*, *‘adlan*, *wa ‘udulan*, *wa ‘adalatan*.³² Kata kerja ini berakar pada huruf-huruf ‘ain, dal dan lam, yang makna pokoknya adalah *al-istiwa* (keadaan lurus) dan *al-wijaj* (keadaan menyimpang).

²⁸ *Ibid.*, 537.

²⁹ Al-Qur'an, 5:8.

³⁰ Ibnu Miskawaih, Menuju Kesempurnaan Akhlak, Cet 3, (Bandung: Mizan, 1995), 115.

³¹ M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika..., 538.

³² Louis Ma'luf, Al-Munjid Fi Al-A'lam, (Beirut: Daar Masyriq, 1982), 556.

Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni *lurus* atau *sama* dan *bengkok* atau *berbeda*. Dari makna pertama, kata adil berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. *Persamaan* itulah yang merupakan makna asal kata adil, yang menjadikan pelakunya *tidak berpihak*.³³

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata ‘*adil*’ yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁴ Keadilan adalah nilai universal dan nilai kemanusiaan yang asasi. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, tentunya dengan tujuan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Keadilan diartikan dengan memberikan hak kepada seseorang secara efektif dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga seorang dikatakan adil apabila mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.³⁵

b. Pengertian Keadilan dalam Islam

Dalam Islam, keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam Al-Qur'an kadang diekuivalensikan dengan *al-Qist*. *Al-mizan* yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Shura: 17 dan Al-Hadid: 25. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.³⁶

Keadilan menurut Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat muslim sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. Dalam Islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah, orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Keadilan

³³ Ar-Ragib Al-Asfahani, Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an, (Beirut: Dar Al-Fikr), t.t, 683.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta, 2001), 517.

³⁵ Akhmad Saikuddin, Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (Telaah Kata Al-adl dan al-Qist dalam Tafsir al-Qurtubi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2014, 87.

³⁶ 38 Jodi Santoso, 2008, Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum, <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/01/prinsip-prinsip-dan-asas-asas-hukum.html> diakses Tanggal 15 November 2021.

adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan ketuganan dalam diri manusia.³⁷

Terminologi lain yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil adalah *al-Qist*, yang mulanya berarti *al-nasib bi-'adli* yaitu pembagian secara adil, sedang letak kata *al-Qist* selalu dihubungkan dengan timbangan. Istilah *al-Qist* dengan berbagai bentuk turunannya di dalam al-Qur'an secara umum berbicara mengenai keadilan, terutama pada aspek terselenggaranya hak-hak yang menjadi milik seseorang secara proporsional.³⁸

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal: pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Ar-Rahman (55): 7 sebagai berikut:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.

Artinya: "dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)". (QS. Al-Rahman 55:7).³⁹

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan, segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.

Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memiliki sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati

³⁷ Ali Nurdin, *Quranic Society*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 248.

³⁸ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: Kajian Kosakata, 2007), 6-7.

³⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 53-58.

didalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya, keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.⁴⁰

Konsep keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles, keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia masuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.⁴¹

Keadilan dalam Islam ialah keadilan yang mengatur semua segi kehidupan manusia secara seimbang dan menyeluruh. Keadilan dalam Islam tidak memecahkan persoalan-persoalan di dalamnya secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian yang terpisah antara satu dengan yang lain. Hal ini karena Islam mempunyai konsep menyeluruh dan lengkap tentang alam dan manusia. Islam tidak ada mengklasifikasikan tentang derajat manusia satu dengan manusia lainnya, karena semua manusia itu sama di hadapan Sang Khaliqnya, yang membedakan manusia itu hanyalah ketakwaan seorang hamba terhadap Rabbnya.

c. Pengertian Keadilan Ekonomi

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan dan etika Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari shari'ah Islam itu sendiri (*Maqashid al-Shari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki

⁴⁰ *Ibid.*, h. 58.

⁴¹ AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), 1.

bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama syariat Islam (*Maslahah al'Ibad*).⁴²

Allah adalah penciptaan segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”.

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksplorasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.⁴³ Adil memiliki banyak pengertian, antara lain:

Dalam KBBI, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang teguh kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan dalam bahasa arab, keadilan berasal dari kata ‘adala yang dalam al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk kalimat berita.⁴⁴

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum, harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu harus terbebas dari eksplorasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.⁴⁵

⁴² Akhma Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007. 8.

⁴³ *Ibid.*, 36.

⁴⁴ *Ibid.*, 37.

⁴⁵ Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam, Malang: UIN Malang Press, 2007, 96.

d. Keadilan Sebagai Fairness

Seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah *kejujuran, kewajaran, kelayakan*. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair, dan harus dipedomani “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.⁴⁶

Tapi berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turus serta mendukung upaya tersebut.⁴⁷ Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal atau substansial, hal ini sepertinya sangat sulit untuk ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.

e. Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami

Surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami.

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua

⁴⁶ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), 99.

⁴⁷ *Ibid.*, 100.

istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁴⁸

3. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik ini kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁴⁹

b. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi mikro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.⁵⁰

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat mensejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme ekonomi yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.⁵¹

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya

⁴⁸ Muhammad Shahru, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 428.

⁴⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2005, 24.

⁵⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999, 23.

⁵¹ *Ibid.*, 23.

mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.⁵²

c. Jenis-jenis Kesejahteraan Ekonomi

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah.

1) Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Non-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Non-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).⁵³

Pendekatan Non-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern berkembang dari neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang bersifat materil dan rohani yang bersifat non materil.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, 23.

⁵³ Dominick Salvatore, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 56.

⁵⁴ *Ibid.*, 56.

2) Kesejahteraan Ekonomi Syariah

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami eksejahteraan ekonomi yaitu:⁵⁵

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Artinya: “*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”: (QS. al-Anbiya’ (21):107).⁵⁶

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam teryata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallah wa hablum min al-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringin dengan anjuran melakukan amal sholeh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan oleh H.M Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur'an, yang dikutip oleh Ikhwan Abidin Basri bahwa

⁵⁵ Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 85.

⁵⁶ Al-Qur'an, 21:107.

kesejahteraan sosial yang didambakan al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhilafahan.⁵⁷

d. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:⁵⁸

- 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- 3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:⁵⁹ 1) Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh. 2) Nilai-Nilai Sistem Perekonomian, dan 3) Keadilan Distribusi Pendapatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam praktik poligami tidak hanya berkaitan dengan aspek emosional dan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat signifikan. Tafsir terhadap ayat-ayat perkawinan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa keadilan yang diwajibkan dalam poligami mencakup pemenuhan kebutuhan finansial secara adil terhadap seluruh istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan. Dalam perspektif ekonomi, poligami dapat menimbulkan tantangan serius dalam pembagian sumber daya, pengelolaan nafkah, dan perlindungan hak-hak ekonomi

⁵⁷ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi...*, 87.

⁵⁸ *Ibid.*, 88.

⁵⁹ *Ibid.*, 88.

perempuan. Oleh karena itu, keadilan dalam poligami bukan hanya bersifat teoritis dan normatif, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan ekonomi rumah tangga yang adil dan berkelanjutan.

SARAN-SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Legislator: Perlu adanya penguatan regulasi yang menekankan syarat ekonomi dalam pemberian izin poligami, agar praktik ini tidak menjadi beban bagi salah satu pihak, terutama perempuan dan anak-anak.
2. Bagi Tokoh Agama dan Akademisi: Diperlukan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan interdisipliner dalam memahami ayat-ayat poligami, termasuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi kontemporer.
3. Bagi Masyarakat: Sebelum memutuskan untuk melakukan poligami, perlu dipertimbangkan secara matang aspek keadilan ekonomi dan kesiapan dalam memenuhi tanggung jawab finansial terhadap semua anggota keluarga.
4. Untuk Penelitian Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan studi empiris terhadap rumah tangga poligami guna menggali lebih dalam dampak ekonomi yang ditimbulkan dan bagaimana keadilan diwujudkan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, *KHI*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Asfahani, Ar-Ragib, *Mu'jam Mufradat Alfaż Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Sayyid, Abu Malik Kamal bin Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Arsyad, Lincoln, Ekonomi Mikro, Jakarta: Gemapress, 1999.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, Shahih Fikih Sunnah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ash-Shindiqiey, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Abu Bakar, Syeikh Shafa Al-Dimiyati, *I'anatu al-Talibin* Juz 3, Beirul: Dar Al-Fikr, 2002.

- Baro, Rachmad, *Penelitian Hukum Non Doktrinal: Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Buangin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Rafika, 2010.
- Fuadi, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Garvey, James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Cendana, 2006.
- Jarjawi, Ali Ahmad, *Pembebasan Perempuan*, Jakarta: Darul Fallah, 2007.
- Kebudayaan, dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001.
- Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut*, Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi Al-A'lam*, Beirut: Daar Masyriq, 1982.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2008.
- Miskawaih, Ibnu, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Cet 3, Bandung: Mizan, 1995.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
- Mujahidin, Akhma, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manullang, E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- MZ, Labib, *Pembelaan Ummat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Nurdin, Ali, *Quranic Society*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Prunomo, dan Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Qadri, AA, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Salvatone, Dominick, *Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.

Shihab, M. Quraish dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Kajian Kosakata, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1999.

Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994.

Suprayogo, Imam, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Umar, Abu Basyir, *Poligami Anugerah Yang Terzhalimi*, Solo: Rumah Dzikir, 2007.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.